

## REKONSTRUKSI PEMIKIRAN HABERMAS DI ERA DIGITAL

**Jaduk Gilang Pembayun**

Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang

E-mail : [jadukgilangp@gmail.com](mailto:jadukgilangp@gmail.com)

***Abstract:** Public sphere is a theory who created and popularized by Habermas who focus on a historical studies of a critical discussion as a feedback to social realities consists of politic, culture, and anything else that interests the citizen happen in 18th century. Emergence of the internet as a new media make cultural change and transform the public sphere into something that has a big scale who can access anywhere and anytime. This is a point of the attention to see how shape, character and the problem about the public sphere in the digital era.*

*Keywords: public sphere, internet, new media*

***Abstrak:** Ruang publik adalah sebuah teori yang diciptakan dan dipopulerkan Habermas yang berfokus kepada sebuah kajian historis terhadap diskusi kritis sebagai feedback dari realitas sosial, yang terdiri dari politik, budaya, dan hal apapun yang menarik minat masyarakat yang terjadi pada awal abad ke-18. Kemunculan internet sebagai media baru menjadikan perubahan budaya dan transformasi ruang publik menjadi suatu bentuk wadah yang mempunyai skala besar dan terlepas dari persoalan tempat dan waktu. Hal tersebut menjadi titik perhatian untuk melihat bagaimanakah bentuk dan karakter serta permasalahan yang terjadi tentang ruang public di era digital.*

*Kata kunci: ruang publik, internet, media baru*

## Pendahuluan

Di era konvergensi dan kemunculan internet sebagai media yang bisa digunakan industri media dalam mendistribusikan informasi, warga tidak lagi dipandang sebagai audiens dalam pengertian sekadar mengonsumsi informasi yang disajikan semata. Fasilitas internet memungkinkan karakter berita menjadi lebih luas dan pelaku industri media tidak hanya berhenti pada fungsi untuk menginformasikan (to inform) semata, melainkan juga melibatkan warga untuk berinteraksi dalam sebuah bahasan mengenai fenomena yang terjadi. Konteks pembahasan soal keterlibatan warga ini akan semakin berkembang jauh ketika memasukkan bahasan mengenai *Citizen Journalism*.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Habermas pada tahun 1962 lewat bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Buku ini menggambarkan “transformasi dan kehancuran virtual rasionalitas ruang publik yang tengah berkembang pada abad 19 dan 20 di Inggris, Perancis, dan Jerman” (Midgley, 2012: 19). Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang berkembang pesat pada masa itu seharusnya mampu mengedepankan proses rasional. Akan tetapi, dalam kenyataannya justru terjadi pengekangan kebebasan dan dominasi. Inilah yang kemudian disebut sebagai ruang publik *borjuis*. Ruang publik ini

dikuasai oleh sekelompok *borjuis* yang justru kemudian seolah mengambil alih ruang publik dari negara dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada elemen masyarakat lainnya.

Kajian ini dimulai pasca *holocaust* di Jerman, dimana pada masa tersebut sedang terjadi perubahan politik di Jerman. Jerman pada masa itu sedang menuju masyarakat yang demokratis. Perubahan menuju Jerman yang lebih demokratis ini membutuhkan demokrasi yang memiliki legitimasi (Holub, 2012:58). Habermas menilai bahwa demokrasi yang memiliki legitimasi tersebut tidak semata persoalan legitimasi oleh suara mayoritas, seperti yang umum diketahui sebagai demokrasi. Akan tetapi, lebih kepada adanya proses diskusi yang melalui pertimbangan dan alasan yang rasional.

Keberadaan *public sphere* ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak 1700an. Masyarakat barat seperti Perancis dan Amerika mulai melakukan revolusi, dimana warga masyarakat biasa dilibatkan dalam berbagai proses diskusi publik dalam rangka pembuatan keputusan mengenai berbagai persoalan publik. Keberadaan warung-warung kopi di Inggris dan bar-bar di Perancis khususnya pada pra-revolusi Perancis telah melahirkan masyarakat yang lebih melek terhadap berbagai persoalan kenegaraan di masa itu.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan situasi *authoritarian* yang sebelumnya diterapkan. “Gagasan mengenai ruang publik menunjukkan kemajuan dari gagasan pencerahan yang mencoba membebaskan subjektivitas manusia dari batasan-batasan yang dibuat dalam tradisi autoritarian” (Midgley, 2012:32). Seiring dengan perubahan sistem negara yang semakin liberal, maka kesetaraan menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap individu warga negara.

Akan tetapi, Habermas melihat bahwa pada periode tersebut ruang publik hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok *bourgeois*. Dengan kata lain, tidak seluruh elemen warga negara memiliki suara yang setara. Dalam artian pula, tidak ada ekualitas pada warga negara. Untuk itulah kemudian Habermas merasa perlu untuk membuat konsep ruang publik yang lebih ideal untuk menciptakan kesetaraan ini. “Habermas ingin membuat maksud yang lebih eksplisit dari aturan normatif yang ideal dan dapat menggambarkan bagaimana ruang publik tersebut dapat berkontribusi sebagai kerangka yang esensial dalam masyarakat demokratis” (Midgley, 2012: 34).

Dengan praktek ruang publik *bourgeois* pada masa itu, keberadaan ruang publik berada dalam situasi yang berbahaya. Hal ini dikarenakan ruang publik justru memainkan peranan sentral

dalam masyarakat yang semakin demokratis dan pembentukan opini percakapan mengenai isu publik yang diproduksi dan menopang publik” (Dahlgren, 2000: 44).

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, internet pun kemudian turut memainkan peran penting dalam perkembangan ruang publik. Seperti diutarakan oleh Goode bahwa “*Most discussions of the new mediascape and the publik sphere have highlighted the role of, say, the Internet as a publik sphere, focusing on how well or how poorly the practices it embodies live up to the values of Habermasian discourse ethics*” (Goode, 2005: 114).

Internet memungkinkan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses terhadap informasi. “Internet menawarkan sebuah *prototype* bagaimana dunia maya dapat diaplikasikan meningkatkan proses demokrasi-untuk membuatnya lebih terbuka dan partisipatif” (Dahlgren, 2000: 52). Setiap aktor politik yang ingin terlibat dalam proses politik di masyarakat pun dapat memperluas penyebaran informasi dengan lebih murah, dan terdesentralisasi.

Terdesentralisasi dalam artian kepemilikan informasi tidak hanya terfokus pada sekelompok elite politik. Seperti yang disampaikan oleh Dahl:

*“Teknologi informasi menawarkan beberapa kekayaan untuk mengurangi*

*ketidaksetaraan dalam politik. Evolusi dalam teknologi informasi meningkatkan daya akses kepada informasi mengenai agenda politik, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik. Teknologi baru juga meningkatkan peran penting warga negara untuk dapat berkontribusi pada proses politik. Teknologi komunikasi memperluas alur informasi dan komunikasi dan membuat pemerintah lebih transparan (Dahlgren, 2000:59).*

Menuju *public sphere* yang ideal melalui dunia maya tentu bukannya tanpa usaha keras. Ada begitu banyak tantangan dalam mewujudkan ruang publik yang ideal. Terutama ketika masyarakat tidak cukup rasional dalam memberi argumentasi dan kemungkinan pertukaran informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Melalui fenomena perkembangan ruang publik yang telah peneliti jabarkan di atas, serta minat dan rasa keingintahuan peneliti mengenai wujud ruang publik di era digital sekarang ini, peneliti berusaha menganalisa dan mengkaji mengenai bagaimana rekonstruksi ruang publik di era digital.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai

metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Melalui metode deskriptif peneliti berusaha untuk mengkaji dan menganalisa status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan kejadian tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Sukmadinata (2009:18) juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dunia maya atau *cyberspace* pada dasarnya menyediakan apa yang disebut *public sphere*. Secara digital, karakteristik *cyberspace* bisa dimaknai sebagai sesuatu yang umum atau yang sifatnya pribadi, antarbudaya atau lintas bahasa, hingga pada publik yang terkontrol atau yang bebas. Ibarat alun-alun, di mana kita bisa menemukan beragam karakteristik termasuk juga latar belakang entitas yang berada di sana. Meski siapa saja bisa berada dalam alun-alun, namun tidak berarti otomatis kita menjadi bagian dari ruang tersebut; kita bisa menemukan entitas yang berkelompok di salah satu sudut alun-alun, tetapi kita tidak bisa begitu saja masuk dalam kelompok mereka.

Dunia maya tidaklah sama dengan tipe media tradisional seperti radio, televisi atau penerbitan dan juga tidak pula sejenis dengan pengertian ruang publik secara tradisional dalam kehidupan nyata. Dunia maya memberikan dan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Realitas di dunia maya inilah yang menjadikan Kaskus sebagai ruang

terbuka bagi siapa saja untuk berinteraksi atau sekadar mengkonstruksi diri.

Internet bisa dikatakan sebagai medium yang bisa digunakan untuk diskusi atau debat politik, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas politik. Namun, fungsi ini sama juga dengan penggunaan internet sebagai sarana virtual semata; internet bisa menjadi medium yang dilekatkan pada realitas masyarakat apa saja, tergantung dari pengguna yang mengaksesnya.

Kaskus adalah situs forum komunitas maya terbesar dan nomor 1 Indonesia dan penggunaanya disebut dengan Kaskuser. Kaskus lahir pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal Indonesia yaitu Andrew Darwis, R. Stephanus, dan Budi Dharmawan, yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Kaskus, yang merupakan singkatan dari Kasak Kusuk, bermula dari sekadar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 900 ribu orang, dengan jumlah page view melebihi 15.000.000 setiap harinya. Hingga bulan Juli 2012, Kaskus sudah mempunyai lebih dari 601 juta posting.

Kaskus sejatinya tidak harus dilihat melulu dari sisi ekonomis (FJB). Fungsi yang lain adalah sebagai tempat diseminasi ide dan sirkulasi info yang berperan penting dalam pengembangan rasionalitas publik. Istilah *public sphere* sendiri pertama kali dikemukakan oleh Juergen Habermas. Terminasi *public sphere* biasanya digunakan dalam kerangka komunikasi politik yang positif.

*Public sphere* digambarkan oleh Habermas sebagai sebuah ruang inklusif di mana masyarakat secara kolektif membuat sebuah opini publik dalam sebuah lingkungan terkait dengan kondisi sosial politik maupun ekonomi. Lantas, apakah Kaskus sendiri merupakan *public sphere*? Jawabannya jelas iya. Kaskus merupakan sebuah ruang publik yang inklusif, semua orang asal melek komputer dan internet bisa menggunakannya. Tujuan orang menggunakan Kaskus juga mulai berkembang. Orang tidak hanya mengenal Kaskus sebagai tempat jual-beli, tapi juga sebagai tempat untuk melemparkan sebuah wacana. Ketika wacana yang dilemparkan ditanggapi oleh pihak lain, mereka merasa eksis di sana hingga seterusnya berkembang tanpa sadar menjadi sebuah opini publik.

Dalam situasi seperti ini yang paling diuntungkan adalah dunia marketing khususnya marketing politik. Ada sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dalam

*public sphere* ini baik dalam mengarahkan opini maupun memobilisasi dukungan. *Thread* Kaskus yang melegenda adalah ‘*Semua Tentang Jokowi-Ahok*’ dan ‘*Menuju Sepak Bola Indonesia yang Lebih Baik*’. Sungguh fenomenal, sebuah *thread* bernama ‘*Semua Tentang Jokowi-Ahok*’ mampu meraup banyak sekali pendukung ketika Jakarta sedang gegap gempita dengan Pilgubnya. Dukungan tidak hanya datang dari Kaskuser Jakarta, tapi juga dari mereka yang berdomisili di luar Jakarta. Padahal di sub-froum yang sama, hadir pula *thread* ‘*Semua Tentang Foke-Nara*’ dan kandidat lainnya. Entah berpengaruh secara langsung atau tidak, yang jelas pada hari H perolehan suara Jokowi-Ahok mampu mengalahkan sang *incumbent*.

Kaskus sebagai sebuah forum sosial diakui memang cukup ampuh untuk mengikat kapital sosial. Kaskus banyak membantu orang untuk berhubungan dengan koleganya ataupun orang asing. Proses berinteraksi dengan orang yang terpisah jarak dan hubungan-hubungan tersebut sering kali menghasilkan sebuah *common reciprocity* atau keuntungan bersama. Namun di balik kekuatannya ini Kaskus juga menyimpan potensi bagi terbentuknya sosok masyarakat baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Sosok masyarakat baru ciptaan Kaskus terutama pada fenomena yang mungkin akan mengakibatkan orang untuk

menghindari berkomunikasi ataupun berjualan secara *'face to face'*. Alasan klasik yang biasa dikemukakan adalah *'because it's easier'*. Permasalahannya adalah adanya gap antara *'real life'* dengan *'dunia maya'*. Kebiasaan ini, hemat penulis, akan dapat mengancam *skill* seseorang untuk berkomunikasi secara verbal.

Dalam keterbatasan wilayahnya, dunia maya memunculkan sebuah konsep forum sebagai jawaban atas kebutuhan akan *public sphere*. Kasak Kusuk atau yang kerap disapa Kaskus konon lebih terkenal karena Forum Jual Belinya. Dalam perkembangannya, Kaskus telah menjadi sebuah *public sphere* di dunia maya. Dalam hal ini, *public sphere* dimaknai sebagai suatu ruang publik yang tidak riil dan memiliki peran menampung kepentingan publik dibedakan dalam semacam sub-forum (yang terdiri dari banyak *thread*), dari yang minimal (dikontrol atau ada pihak yang dominan dalam arena) tingkat kepublikannya sampai yang maksimal atau mendekati ideal (bebas nilai). Bisa juga Kaskus secara abstrak sebagai *public sphere*, dimaknai sebagai sebuah arena interaksi pertukaran ide dan opini publik.

Ada sebuah pernyataan menarik dari Habermas (1989) yang menyampaikan bahwa *café* di kawasan London, Inggris telah menjelma menjadi sebuah *public sphere*. Bahkan cerita mengenai salon-

salon di Paris menjalankan sebuah fungsi yang sama sebagai *public sphere* di kawasan perkotaan. Habermas juga menyatakan bahwa (di dalam *public sphere*) opini menjadi sebuah isu yang terbebas dari ikatan ketergantungan ekonomi. Dari dua contoh kasus yang diusung Habermas (1989) kita melihat *setting* kultural turut mempengaruhi lokasi dan bentuk arena *public sphere*. Jika di Inggris terdapat *café* dan di Paris terdapat salon, maka di dunia maya terdapat forum internet.

Secara umum, Kaskus memiliki karakteristik sebagai berikut: aksesibilitas yang tidak terbatas bagi siapa saja karena semua orang bisa mendaftar; kaskuser memiliki kebebasan untuk berlama-lama posting di forum-forum yang ada di Kaskus; dan kaskuser merasa bebas untuk berbicara mengenai masalah apapun. Tema pembicaraan pun beragam, mulai dari tema-tema serius seperti isu keamanan negara dan kebijakan pemerintah hingga yang ringan atau sekedar *posting* tak jelas yang sering disebut dengan *junker*. Kaskus dibuat untuk menampung semua ide, gagasan, pemikiran, dan pendapat semua membernya.

Tak ada larangan formal, tetapi yang jelas perlu menjaga budaya Kaskus, yaitu dengan tidak *flaming* (provokatif atau mengadu domba), terutama isu SARA. Kemauan untuk berbagi dan menjaga

perasaan orang lain menjadi sangat penting dalam bersikap.

Kontrol sosial merupakan kesadaran bersama sebagai manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi intensitas dengan lingkungan sekelilingnya untuk bertingkah laku dalam cara-cara tertentu tanpa memandang secara berlebihan kepentingan sendiri. Hal tersebut muncul dalam pembicaraan di Kaskus pada forum BPLN yang membahas mengenai isu keamanan, kritisi kinerja anggota dewan (yang seringkali disebut dHewan), atau gosip yang membicarakan wanita sebagai salah satu korban pelecehan yang hamil tanpa suami.

Memang nampak seperti *stereotype* ketika dikatakan bahwa para kaskuser itu sedang bergosip. Akan tetapi, memang itulah realita yang ada dan seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat, gosip diasosiasikan sebagai sebuah kontrol sosial. Di samping itu, adanya proses tukar gagasan kritis mengenai lingkungan sekitar di Kaskus, membuat situs tersebut menjadi sebuah wadah kontrol sosial pada kota atau suatu komunitas yang bersangkutan.

Bagaikan pedang bermata dua, selain kelebihan public sphere virtual juga memiliki kekurangan yang menariknya, berasal dari efek kelebihan yang dimilikinya. Kekurangannya yaitu informasi terkadang tidak dapat dipercaya sumbernya, informasi yang disampaikan

digunakan demi kepentingan pribadi/segelintir orang/kelompok, informasi dengan tujuan komersial, memberikan informasi yang bersifat pribadi, memberi informasi dengan tujuan pencemaran nama baik, membicarakan hal-hal kecil yang sengaja di besar-besarkan serta banyak hal lain yang dimana semua kegiatan tersebut tidak bertujuan demi kepentingan bersama. Semua hal tersebut mudah sekali terjadi karena kelebihan yaitu kemudahan diakses bagi siapa saja yang memiliki hubungan internet dan sifat penggunaanya yang anonim, kita tidak bisa mengetahui dengan jelas identitas yang memberikan informasi dan kualitas dari informasi tersebut.

Kebebasan bermedia dan berinformasi juga merupakan ciri dari terwujudnya negara demokrasi. Dengan semboyan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*, masyarakat mempunyai ruang partisipasi yang harus dijamin oleh pemerintah sebagai aparatur negara dan representator rakyat, termasuk dalam bermedia massa dan memperoleh informasi. Tanpa adanya kebebasan bermedia massa oleh masyarakat, maka yang akan terjadi adalah kemandulan demokrasi yang berujung pada lemahnya partisipasi rakyat dalam berpolitik dan bernegara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Randall bahwa untuk mewujudkan berfungsinya demokrasi,

masyarakat sipil membutuhkan akses terhadap informasi sebagai alat untuk mengetahui pilihan - pilihan politik. Sementara para politisi membutuhkan media untuk menyampaikan pandangan - pandangan mereka dan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Media tidak berdiri sendiri dalam sebuah sistem sosial tetapi menyediakan saluran komunikasi para pelaku di dalamnya.

Kaskus sebagai *public sphere* mempunyai dua peran penting yaitu sebagai sumber informasi dan menyediakan ruang bagi publik untuk melakukan diskusi dan debat publik. Kaskus sebagai domain penyelenggara *public sphere* harus menjadi tempat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Karena dengan jurnalisme yang berimbang dan independen serta *public sphere* yang terjamin kebebasannya maka akan muncul opini publik yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh publik. *Public opinion* tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai dasar lahirnya kebijakan public (*public policy*) yang berpihak kepada publik yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya mutu *public service*.

Sebagaimana Jürgen Habermas yang mendefinisikan public sphere yaitu “A domain of our social life where such a thing as public opinion can be formed (where) citizens.... deal with matters of general interest without being subject to

*coercion.... (to) express and publicize their views”.*

Konsep *publicsphere* dari Habermas mengutamakan *dialogical conception*(konsepsi dialogis) dengan asumsi bahwa individu-individu datang bersama-sama ke lokasi yang sama dan terjadinya dialog satu sama lain, sebagai peserta yang sama dalam percakapan *face-to-face* (McKee, 2005: 257).

Undang-undang dasar tahun 1971 yang seluruhnya diadaptasi dari Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tanggal 26 Agustus 1789 melengkapi rumusan ide tentang “ruang publik” di pasal 11: “Mengomunikasikan ide dan opini dengan bebas adalah hak paling hakiki bagi manusia. Maka oleh sebab itu, setiap orang boleh berbicara, menulis dan mencetak dengan bebas, asalkan bertanggungjawab bagi kesalahpenggunaan kebebasan ini dalam kasus-kasus tertentu seperti yang ditetapkan oleh hukum.” Undang-undang dasar tahun 1793 tegas-tegas mencantumkan kebebasan berkumpul demi melindungi kebebasan berekspresi ini: “Hak untuk mengomunikasikan ide dan opini, entah melalui pers atau dengan cara lain, hak untuk berkumpul dengan damai....tidak dapat disanggah lagi.” Habermas membedakan tiga jenis *öffentlichkeit (public sphere)*:

1. *politische öffentlichkeit*: artinya ruang publik politik atau politis (atau kadang-kadang diterjemahkan

menjadi ruang publik di wilayah politik/politis)

2. *literarische öffentlichkeit*: diterjemahkan sebagai ruang publik sastra/literer (atau ruang publik di dunia sastra/tulis-menulis), dan
3. *repräsentative öffentlichkeit*: perepresentasian/perwakilan publik (yakni pertunjukan kehormatan di depan khalayak yang menonton) (Habermas, 1997:119)

Di dalam *public sphere* akan terbentuk sebuah public opinion, dimana biasanya public opinion ini mempengaruhi kebijakan dari negara. Public opinion merujuk pada kritik atau kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Opini personal dari individu-individu akan menjadi opini publik melalui partisipasi dalam debat publik yang bebas dan adil serta terbuka bagi semua.

Kemunculan media massa seperti surat kabar, radio dan televisi memang membuat perubahan signifikan dalam rekonseptualisasi public sphere ala Habermas. Matriks demokrasi politik seperti coffee house, public square, salon, tischgesellschaften, town hall dan banyak tempat lainnya tidak lagi menjadi tempat untuk diskusi dan aksi politik. Perannya, seperti dikatakan Mckee (2005), digantikan oleh media massa. Menurutnya TV, koran, majalah, fotografi dan media lainnya merupakan public domain, tempat dimana publik sering diciptakan. Melihat kenyataan

tersebut, jelas era pembicaraan *public sphere* dalam arti *face-to-face* sudah bergeser. Karenanya, Poster dalam “Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere” mengatakan, hendaknya apa yang dikatakan Habermas tentang konsep public sphere sebagai ruang homogen dimana subyeknya mempunyai relasi simetrikal, dalam arena publik elektronik terabaikan (Mckee, 2005:109).

Bentuk-bentuk ala salon dan *coffee house* mungkin berubah menjadi virtual communities, electronic cafes, bulettin board, e-mail atau teleconference. Peran mengisi ruang antara kekuatan negara dan civil society sebenarnya dapat diisi oleh media massa. Media dapat memainkan peranan signifikannya dalam membentuk dan menyebarkan informasi dalam pembentukan opini publik.

Menurut Habermas, semula media memang dibentuk dan menjadi bagian integral dari *public sphere*. Hanya saja, kemudian media dikomersilkan menjadi komoditi sehingga menjauhkan perannya semula sebagai pengisi ruang publik. Dalam masalah ini, Habermas terlihat pesimis dengan peran media massa karena perhatiannya mengenai public sphere lebih tertuju pada diskusi politik dengan membesar-besarkan komersialisasi media massa. Pasar bebas melahirkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang bersifat hegemonik dan monopolistik dimana satu atau

beberapa produsen dan penyalur bisa menentukan jangkauan dan kualitas layanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Secara teoritis, media massa memang telah mampu menciptakan *public sphere* bagi khalayak untuk memberikan aspirasi dan turut pula dalam diskusi-diskusi publik melalui media massa. Hal ini dapat dilihat dengan dibukanya rubrik opini dan surat pembaca di media cetak serta munculnya berbagai *talk show* yang membahas permasalahan publik di media televisi dan radio. Sulit rasanya bagi media massa untuk menciptakan sebuah ruang publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan bebas dari bias kepentingan. Habermas menyebutkan tentang degradasi *public sphere* oleh media massa yang justru dilakukan oleh praktek media massa dan tumbuhnya budaya masyarakat konsumtif daripada masyarakat kritis (Habermas, 1997:159). Hal ini dikarenakan media massa kini lebih banyak dipenuhi promosi dan hiburan daripada forum yang membahas permasalahan publik.

*Public sphere* yang termediasi dalam sebuah media massa sangat bergantung pula pada sistem pers yang dianut oleh negara sebagai sebuah penjamin kebebasan pers. Di Indonesia sendiri sistem pers yang dianut adalah sistem pers tanggung jawab sosial sebagai

pendukung terselenggaranya *public sphere* yang sehat. Sistem pers tanggung jawab sosial mulai diterapkan di Indonesia sejak bergulirnya masa reformasi. Mulai berlakunya sistem ini dikarenakan adanya kebebasan pers yang tidak lagi mengalami restriksi oleh pemerintah sehingga pers benar-benar menjadi lembaga sosial yang independen. Sistem pers tanggung jawab sosial memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi awak pers untuk memproduksi berita dengan catatan tetap harus memperhatikan kepentingan publik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Severin dan Tankard, 2005 : 49).

Profesi dalam dunia pers dapat dilakukan oleh siapa saja dengan syarat memiliki kredibilitas dan bertanggung jawab. Pers dianggap bagian dari masyarakat yang tidak bisa lagi dipisahkan fungsinya sebagai media transformasi informasi publik. Namun dalam sistem ini pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena dibawah pengawasan sebagai konsumen, sehingga pers tidak bisa sekehendaknya dalam pembuatan dan penyiaran berita (Tankard,2005:59).

Kebebasan merupakan sesuatu yang krusial bagi pers untuk dapat melakukan siarannya secara independen dan tanpa harus takut tekanan pihak manapun. Namun, kebebasan pun tidak serta merta diberikan begitu saja. Oleh karena itu, negara kemudian menjamin dan mengatur

kebebasan pers melalui *UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi, "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"* (UUD 1945). Selain itu, kebebasan pers juga dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, bahkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang mencoba menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta (Pasal 18 ayat 1) (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Meskipun dijamin oleh UU sebagai hak asasi manusia, namun kebebasan pers hanyalah salah satu dari sekian banyak hak-hak asasi manusia yang lain. Hak asasi seseorang pun tidak bisa dipenuhi secara mutlak karena terbentur hak asasi orang lain.

Landasan inilah yang kemudian dijadikan dasar bahwa kebebasan pers harus bertanggung jawab kepada publik. Meskipun memiliki kebebasan berekspresi,

namun pers harus menghormati hak-hak orang lain. Kebebasan pers juga tidak boleh melampaui hak pihak lain seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa kebebasan pers dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Keterkaitan antara media massa dan kebebasan pers merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan demi mewujudkan *public sphere* yang dapat memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi dan pedapatnya secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu media massa harus memberikan kebebasan bagi publik untuk memperoleh dan menyampaikan opini mereka.

## Simpulan

Perubahan budaya dan bentuk ruang publik secara global serta beragamnya media komunikasi dan atau interaksi melalui perangkat internet memberikan peluang baru terciptanya ruang virtual dengan topik bahasan yang beragam. Namun, kenyataan juga tidak bisa dibantah bahwa koneksi yang dalam segi kuantitas terbilang banyak tersebut tidak menutup kemungkinan *virtual space* tersebut menjadi tidak demokratis dan eksklusif dengan anggota yang terdiri dari kumpulan orang yang memiliki kepentingan pribadi dibandingkan publik.

Bagaikan pedang bermata dua, selain kelebihan public sphere virtual juga memiliki kekurangan yang menariknya, berasal dari efek kelebihan yang dimilikinya. Kekurangannya yaitu informasi terkadang tidak dapat dipercaya sumbernya, informasi yang disampaikan digunakan demi kepentingan pribadi/segelintir orang/kelompok, informasi dengan tujuan komersial, memberikan informasi yang bersifat pribadi, memberi informasi dengan tujuan pencemaran nama baik, membicarakan hal-hal kecil yang sengaja di besar-besarkan serta banyak hal lain yang dimana semua kegiatan tersebut tidak bertujuan demi kepentingan bersama. Semua hal tersebut mudah sekali terjadi karena kelebihannya yaitu kemudahan diakses bagi siapa saja

yang memiliki hubungan internet dan sifat penggunaannya yang anonim, kita tidak bisa mengetahui dengan jelas identitas yang memberikan informasi dan kualitas dari informasi tersebut.

## Daftar Pustaka

- Dahlgren, Peter. 2000. *Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media*. London: SAGE Publications
- Goode, Luke. 2005. *Jurgen Habermas: Democracy and the Public Sphere (Modern European Thinkers)*. Northampton: Pluto Press.
- Habermas, Jurgen. 1997. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
- Holub, Robert C. 1991. *Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere*. New York: Routledge
- Idris, Naswil & Shelton A. Gunaratne. 2000. *Handbook of the Media in Asia*. California : Sage Publications.
- McKee, Alan. 2005. *The Public Sphere: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University.
- Midgley, David. 2012. *Beyond Habermas: Democracy, Knowledge, and the*

*Public Sphere*. London: British Library

Montag, Warren. 2000. *Masses, Classes and the Public Sphere*. New York: Verso Published

Severin, Werner J. dan James W. Tankard, JR. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Edisi 5. Jakarta: Prenada Media.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.